

MODEL PENGUKURAN KINERJA DAN EFISIENSI SEKTOR PUBLIK METODE FREE DISPOSABLE HULL (FDH)

Akhmad Syakir Kurnia

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Abstract

Improved efficiency is the main effect expected from fiscal decentralization. Improved efficiency could be gained on the presumptions that local governments are much better in identifying and fulfilling the needs of households, since they are closer to them, and in mobilizing and using local resources to pay for goods and services having purely local impacts. Once, improved efficiency could be gained, public sector performance increases.

I developed a model to measure public sector efficiency (PSE) and public sector performance (PSP). I compute public sector performance (PSP) and Public Sector Efficiency (PSE) indicators comprising a composite and five sub-indicators for Regency/municipality in Central Java Province. The first two indicators reflects socio-economic indicators that take into account education and health outcomes. Three other indicators reflect the standard "musgravian" task for government: allocation, distribution and stabilisation.

Keywords *Fiscal Decentralization, Public Sector Efficiency (PSE), Public Sector Performance (PSP), Free Disposable Hull (FDH).*

LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah (desentralisasi fiskal) yang efektif dimulai sejak Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan ini sejalan dengan pelimpahan kewenangan dalam beberapa bidang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disahkannya Undang-undang No.32 tahun 2005 tentang pemerintah daerah dan UU. No. 33 tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat sebagai perubahan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dimaksudkan untuk lebih menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Meningkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengenai sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan

ketika setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien.

Dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, maka seharusnya desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Lebih jauh dari itu, dengan efisiensi pengeluaran daerah yang semakin tinggi, output akan bisa ditingkatkan dengan sumber daya yang ada dan pencapaian indikator-indikator pembangunan pun akan bisa lebih terakselerasi.

Namun, sayangnya otonomi daerah di Indonesia yang telah berjalan hampir lima tahun sejak efektif dimulai tahun 2001 sejauh ini lebih diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah. Banyak sekali peraturan-peraturan daerah (PERDA) dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menarik PAD dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang dampaknya seringkali justru tidak kondusif bagi perekonomian daerah dan kontraproduktif terhadap tujuan desentralisasi fiskal. Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan (*institutional failure*) di pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya praktik-praktik korupsi.

Kembali pada gagasan dan ide awal bahwa desentralisasi seharusnya meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah, desentralisasi seharusnya mempercepat pencapaian-pencapaian sasaran pembangunan. Dengan demikian anggaran

merupakan instrumen perencanaan pembangunan yang sangat strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Oleh karena itu mekanisme penganggaran oleh pemerintah daerah seharusnya berorientasi pada kinerja (*performance-based budgetting*) yang akan dicapai.

Disahkannya PP No. 105 tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang intinya adalah mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi momentum penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara semakin memberikan artikulasi akan pentingnya anggaran berbasis kinerja ini.

Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka prestasi setiap daerah dalam pengelolaan keuangannya seharusnya bukan ditekankan hanya pada kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah saja, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah terakselerasinya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.

Oleh karena itu perlu dikembangkan model-model pengukuran prestasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Model yang dikembangkan untuk mengukur efisiensi dan kinerja sektor publik ini diharapkan bisa menjadi salah satu kriteria untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Penyediaan layanan publik yang maksimal ini seharusnya menjadi tujuan dari setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain seberapa efisien setiap Rupiah yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran pembangunan

menjadi satu permasalahan yang penting dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.

Studi ini diharapkan akan bisa menghasilkan sebuah model untuk mengukur prestasi pengelolaan keuangan daerah berkairtan dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Dengan berdasarkan model tersebut mengukur keberhasilan desentralisasi dalam mengakselerasi pembangunan daerah.

TINJAUAN TEORITIK

Dalam tataran teori ada banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Lihat misalnya smoke (2000) dan Bahl (2000). Dalam perspektif ekonomi, manfaat yang paling menonjol dan diharapkan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah semakin meningkatnya efisiensi alokasi sumber daya. Dengan alokasi sumber daya yang semakin tinggi, pengeluaran pemerintah akan lebih mengena sasaran-sasaran pembangunan. Hasil akhirnya kinerja sektor publik dikatakan meningkat.

Salah satu tujuan dilakukannya desentralisasi fiskal adalah tercapainya efisiensi alokasi sumber daya yang semakin tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) (**Loehr & Manasan, 2004**). Efisiensi yang semakin tinggi ini tercapai dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih mampu mengidentifikasi permasalahan di daerah masing-masing dan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya. Di samping itu, meningkatnya efisiensi juga dimungkinkan karena kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi dan memberdayakan potensi sumber daya daerahnya untuk menghasilkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pengeluaran daerah (**Peterson, 1996**).

Desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui dua konsep yaitu desentralisasi pe-

nerimaan pemerintah (*revenue decentralization*) dan desentralisasi pengeluaran pemerintah (*expenditure decentralization*) (**Wescott, 2002**). Oleh karena itu, efisiensi sebagai hasil dari desentralisasi fiskal dapat dilihat melalui efisiensi penerimaan dan efisiensi pengeluaran publik (efisiensi pengeluaran pemerintah)

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien. Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu:

1. Efisiensi produksi.
2. Efisiensi alokasi.
3. Efisiensi fiskal.

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara berbagai pengeluaran yang menghasilkan output yang paling maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lain.

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan di antara

berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. Pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui.

Efisiensi fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. Secara umum sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari dua komponen utama, yaitu; PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan daerah ini menyangkut tiga hal; (1) apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target target pengeluaran tertentu pula? (2) Dana perimbangan (transfer dari pemerintah pusat) seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah daerah, (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi regional.

METODE

Public Sector Performance, PSP dan Public Sector Efficiency, PSE

Dampak positif dari desentralisasi fiskal telah disebutkan sebelumnya salah satunya tercermin dari efisiensi pengeluaran publik. Dengan merujuk pada Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2003), tulisan ini akan menyusun indeks kinerja sektor publik dan indeks efisiensi sektor publik dengan menggunakan metode *Public Sector Performance (PSP)* dan *Public Sector Efficiency (PSE)*.

Nilai PSP tergantung pada indikator-indikator kinerja ekonomi tertentu, yang terdiri dari indikator “musgravian” standar dan variabel sosio ekonomi (I).

$$PSP_i = \sum_{j=1}^n PSP_{ij}$$

di mana:

i : unit pemerintah i atau dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah i.

j : kinerja unit pemerintah pada sektor j atau dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah pada sektor j.

Nilai PSP merupakan fungsi dari berbagai kinerja sosio ekonomi.

$$PSP_{ij} = f(I_k)$$

di mana:

i : indikator “musgravian” standar dan variabel sosio ekonomi

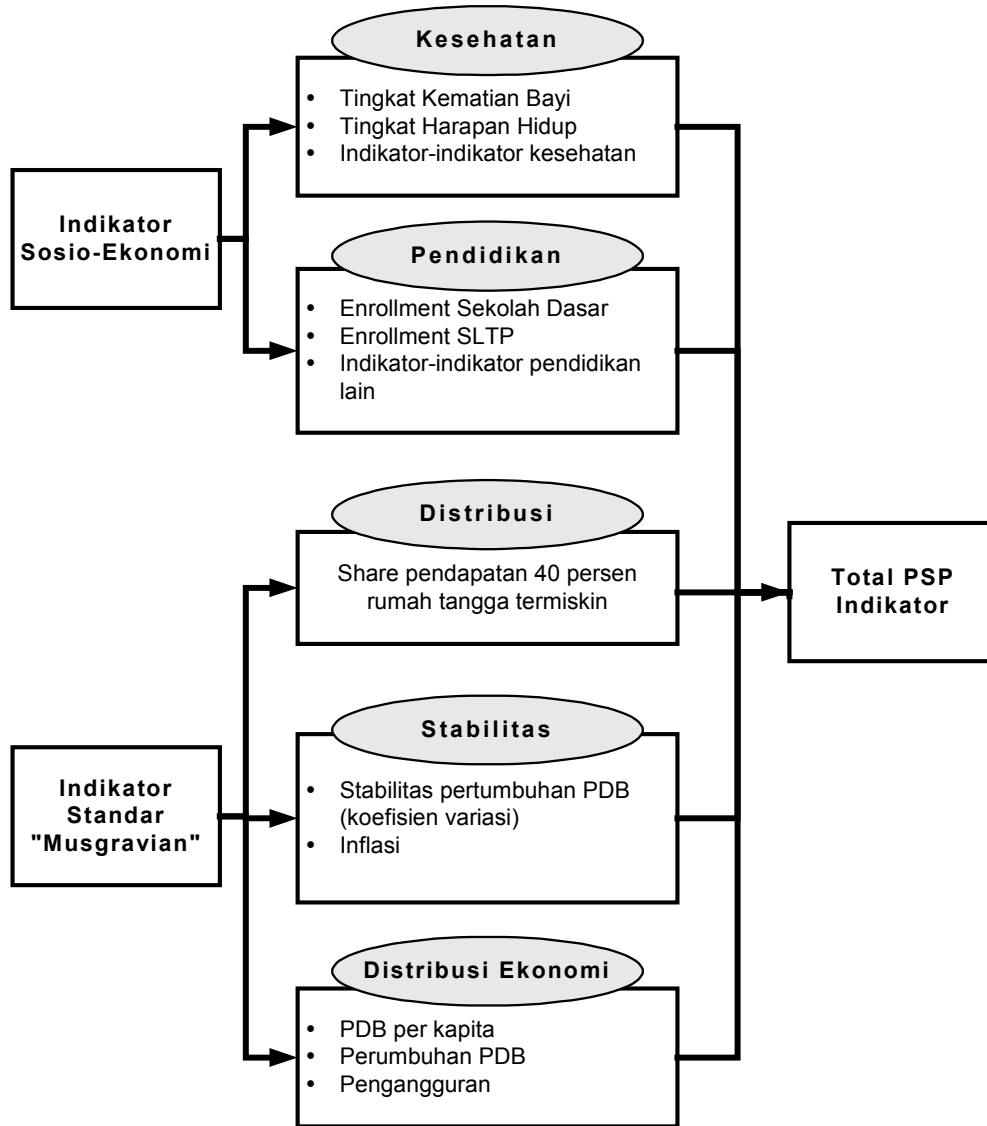
k : indikator-indikator dalam masing-masing variabel sosio-ekonomi.

Oleh karena itu, perubahan pada *public sector performance*, tergantung pada perubahan nilai-nilai indikator standar musgravian dan indikator sosio-ekonomi yang relevan, atau dapat dinotasikan sebagai berikut

$$\Delta PSP_{ij} = \sum_{i=k}^n \frac{\partial f}{\partial I_k} \Delta I_k$$

Untuk menaksir *PSP* penelitian ini menggunakan 5 sub indikator kinerja publik, yaitu kesehatan, pendidikan, distribusi, stabilitas dan kinerja ekonomi. Dua sub indikator pertama adalah indikator sosio-ekonomi. Sedangkan tiga indikator berikutnya adalah indikator kinerja yang mengacu pada indikator kinerja publik *Musgrave (Standard Musgravian Indicators)*. Komposisi total indikator *Public Sector Performance* yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Gambar 1.

Gambar 1: Total PSP Indikator



Secara teknis, angka PSP diperoleh dengan melakukan kompilasi terhadap sub-sub indikator musgravian dan indikator sosio-ekonomi.

Tahap berikutnya adalah menghitung indikator efisiensi sektor publik. Berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2, indikator efisiensi sektor publik dapat dihitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$PSE_i = \frac{PSP_i}{PEX_i}$$

$$\frac{PSP_i}{PEX_i} = \sum_{j=1}^n \frac{PSP_{ij}}{PEX_{ij}}$$

Marginal productivity dari pengeluaran publik bernilai positif dan menurun, maka;

$$\frac{\partial PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}} > 0, \frac{\partial^2 PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}^2} < 0$$

dimana:

PEX: Rata-rata pengeluaran publik (normalisasi).

Untuk menghasilkan kinerja total sektor publik dari berbagai komponen indikator yang mempunyai satuan yang berbeda, maka dilakukan normalisasi data untuk tiap indikator kinerja. Normalisasi dilakukan dengan cara menghitung rata-ratanya, selanjutnya nilai rata-rata tersebut dijadikan angka satu dan setiap nilai dibagi dengan nilai rata-ratanya tersebut. Sedangkan untuk indikator-indikator dengan orientasi kinerja yang terbalik (misalnya pengangguran semakin tinggi nilai pengangguran semakin jelek kinerja ekonomi unit pemerinrah daerah), normalisasinya dilakukan dengan

membagi rata-ratanya tersebut dengan nilai sub indikator.

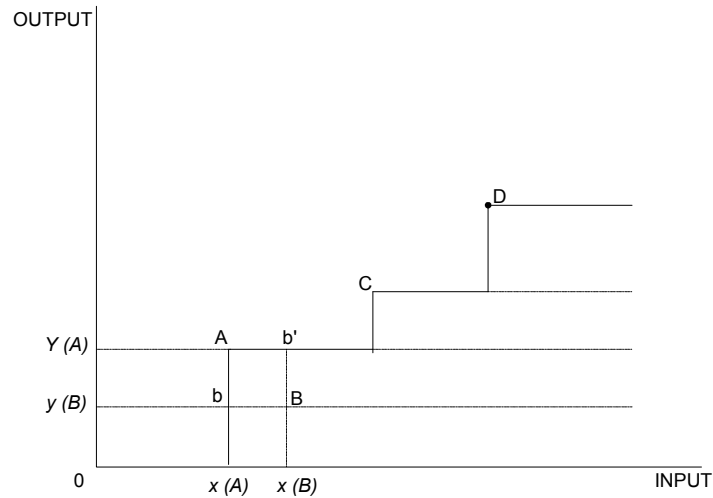
Metode penghitungan efisiensi sektor publik (PSE) dengan menggunakan metode di atas terbatas hanya untuk menghasilkan skor efisiensi tetapi tidak bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dengan melakukan simulasi manajerial untuk meningkatkan nilai efisiensi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini pengukuran skor efisiensi juga dilakukan dengan menggunakan metode *Free Disposable Hull (FDH)*.

Free Disposable Hull (FDH)

Free Disposal Hull (FDH) digunakan untuk mengukur efisiensi relatif unit-unit produksi. FDH adalah teknik analisis non parametrik yang pertama kali dikembangkan oleh Deprins, Simar dan Tulkens pada tahun 1984. Dengan FDH dimungkinkan untuk membuat peringkat efisiensi tiap unit produksi dengan memeperbandingkan kinerja setiap unit produksi dengan *Production Possibility Frontier* nya (PPF).

Pengukuran efisensi pengeluaran publik dengan teknik FDH pernah dilakukan oleh Vanden Eekhaut, Tulkens dan Jamar pada tahun 1993 (Afonso et. all, 2003). Dalam studinya Vanden Eekhaut, Tulkens dan Jamar meneliti efisiensi penegeluaran pemerintah di kota-kota di Belgia. Fakin dan Crombrughe (1997) menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menggunakan data beberapa pelayanan pemerintah (*public services*) di Negara OECD dan di negara-negara Eropa Tengah. Gupta dan Verhoeven (2001) menggunakan FDH untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan di negara-negara Afrika. Clements (St. Aubyn, 2002) meneliti efisiensi pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan di Uni Eropa.

Gambar 2:
Free Disposable Hull (FDH) Production Possibility Frontier



Dalam analisis FDH, seorang produsen dikatakan relatif tidak efisien jika terdapat produsen lain yang mampu menghasilkan tingkat output yang sama dengan menggunakan input yang lebih sedikit. Gambar 2 merupakan penjelasan grafis FDH dalam kasus satu input dan satu output

Gambar A memperlihatkan bahwa produsen B relatif tidak efisien dibandingkan dengan produsen A karena produsen B menggunakan input yang lebih banyak untuk menghasilkan output yang lebih sedikit dari output produsen A. Produsen C relatif efisien karena tidak ada produsen lain yang mampu menghasilkan tingkat output yang sama dengan produsen C dengan input yang lebih sedikit. Produsen A dan B menggunakan input yang lebih sedikit untuk menghasilkan output yang lebih sedikit dibandingkan dengan produsen C, sementara produsen D menggunakan input yang lebih banyak untuk menghasilkan output yang lebih banyak. Dengan demikian produsen D relatif lebih efisien.

Secara sederhana, langkah-langkah analisis FDH dalam menentukan efisiensi adalah mengidentifikasi produsen atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang relatif efisien. Dalam Gambar 2 produsen yang relatif efisien adalah produsen A, C dan D. Sementara produsen B adalah relatif tidak efisien. Produsen produsen atau UKE-UKE yang relatif tidak efisien ditunjukkan oleh segi empat di sebelah bawah kanan dari produsen yang relatif efisien. Garis kemungkinan produksi ditunjukkan oleh garis yang menghubungkan produsen-produsen yang relatif lebih efisien. Dalam Gambar 2 garis kemungkinan produksi adalah garis yang menghubungkan titik A, C dan D.

Dalam analisis FDH, satu produsen atau UKE bisa dikatakan relatif efisien meskipun tidak ada produsen lain yang relatif tidak efisien dibandingkan dengannya (tidak ada produsen lain di area segi empat bawah kanan produsen tersebut). Dalam gambar 1, produsen C dan D adalah relatif efisien meskipun ada produsen lain yang berada di area kanan bawah produsen C dan D.

Produsen dengan kondisi seperti itu diasumsikan berada dalam *Production Possibility Frontier* dan disebut *independently efficient*.

Dengan metode yang telah dijelaskan di atas produsen yang relatif efisien dengan produsen lain yang relatif tidak efisien dapat diidentifikasi. Akan tetapi, untuk menentukan tingkatan efisiensi dan melakukan perbandingan efisiensi antar produsen atau UKE masih diperlukan suatu pengukuran yang disebut *efficiency score*. *Efficiency score* diperoleh dengan mengukur jarak antara titik produksi produsen dengan *PPF*.

Pengukuran jarak antara titik produksi dan *PPF* dapat dilakukan dengan 2 cara, dari sisi input (*input efficiency score*) dan dari sisi output (*output efficiency score*). *Input efficiency score* mencerminkan kelebihan input yang digunakan oleh produsen yang kurang efisien jika dibandingkan dengan produsen yang relatif lebih efisien. *Input efficiency score* 1 adalah untuk produsen atau UKE yang berada di *PPF*. Sementara untuk produsen atau UKE yang relatif tidak efisien, *input efficiency score* kurang dari 1.

Output efficiency score mencerminkan tingkat output yang tidak mampu dihasilkan oleh produsen yang relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan produsen yang relatif lebih efisien dengan tingkat penggunaan input yang sama atau lebih sedikit. *Output efficiency score* kurang dari 1 untuk produsen atau UKE yang relatif tidak efisien dan sama dengan 1 untuk produsen atau UKE yang tepat berada di *PPF*.

Dalam kasus kasus produksi dengan satu input dan satu output, jarak antara titik produksi dengan *PPF* dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{input efficiency score} = \frac{x(J)}{x(K)}$$

$$\text{output efficiency score} = \frac{y(K)}{y(J)}$$

di mana:

x (J) adalah jumlah input yang digunakan oleh produsen yang relatif efisien

x (K) adalah jumlah input yang digunakan oleh produsen yang relatif tidak efisien

y (J) adalah jumlah output yang dihasilkan oleh produsen yang relatif efisien

y (K) adalah jumlah output yang dihasilkan oleh produsen yang relatif tidak efisien.

Dalam Gambar 2, jarak antara titik produksi produsen B dengan *PPF* dari sisi input adalah garis *bB* sehingga *Input efficiency score* bisa dihitung dengan $x(A)/x(B)$. Sedangkan, jarak antara titik produksi B dengan *PPF* dari sisi output adalah *b'B* sehingga *output efficiency score* bisa dihitung dengan $y(B)/y(A)$.

Untuk kasus produksi yang menggunakan multiple input dan output (lebih dari satu input dan lebih dari satu output), pengukuran *input efficiency score* dan *output efficiency score* sedikit berbeda. Misal produsen Z yang menggunakan m input adalah relatif tidak efisien dibandingkan dengan produsen lainnya. *Input efficiency score* dihitung yaitu dengan membagi input produsen yang relatif lebih efisien dengan input yang sama yang digunakan oleh produsen Z. Sehingga, pada akhirnya akan diperoleh matrik input efisiensi score dengan orde $m \times n$, di mana m adalah jumlah input yang digunakan dan n adalah jumlah produsen yang relatif efisien dibandingkan dengan produsen z.

Dari matrik *input efficiency score*, diidentifikasi dan diambil *input efficiency score* yang paling tinggi, sehingga diperoleh matrik $n \times 1$. Terakhir, dari matrik $n \times 1$ *input efficiency score* diperoleh yaitu dengan memilih *input efficiency score* yang paling kecil.

EFISIENSI DAN KINERJA SEKTOR PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Publik Sector Performance (PSP)

Data diolah dengan metode sebagaimana telah dijelaskan dalam metode untuk mendapatkan nilai Indikator Kinerja Sektor Publik (PSP) tiap-tiap daerah. PSP tahun 2001 dan tahun 2002 dapat dilihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Indikator kinerja sektor publik tahun 2001 bervariasi antar daerah tetapi variasinya tidak terlalu besar. Kabupaten/kota dengan nilai indikator total PSP tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/kota dengan nilai indikator total PSP terendah adalah Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes

Berdasarkan sub-sub indikator, Kabupaten/kota dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Pati, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Temanggung. Kabupaten/kota dengan sub indikator pendidikan tertinggi adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kota Tegal. Kabupaten/kota dengan sub indikator distribusi tertinggi adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Kudus, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Batang. Kabupaten/kota dengan sub indikator stabilitas tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Klaten. Kabupaten/kota dengan sub

indikator kinerja ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo.

Pada tahun 2002, Kabupaten Grobogan masih merupakan Kabupaten dengan indikator total PSP tertinggi disusul Kabupaten Cilacap, Kota Tegal, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten/kota dengan nilai indikator total PSP terendah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan sub-sub indikator, Kabupaten/kota dengan sub indikator kesehatan tertinggi adalah Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten/kota dengan sub indikator pendidikan tertinggi adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Tegal. Kabupaten/kota dengan sub indikator distribusi tertinggi adalah Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Pemalang. Kabupaten/kota dengan sub indikator stabilitas tertinggi adalah Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Klaten. Kabupaten/Kota dengan sub indikator kinerja ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, Kota Magelang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Kudus.

Untuk mengetahui perubahan (peningkatan maupun penurunan) total PSP indikator selama dua tahun, total PSP indikator tahun 2001 dan 2002 diilustrasikan dalam *scatter plot* seperti dalam Gambar 3.

Tabel 1: Public Sector Performance (PSP) Tahun 2001

No	Kabupaten/Kota	Opportunity Indicators		Musgravian Indicators			Total PSP
		Kesehatan	Pendidikan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Kab. Cilacap	0,94	0,99	1,06	0,99	2,47	1,29
2	Kab. Banyumas	0,99	1,10	1,02	1,77	0,59	1,09
3	kab. Purbalingga	0,93	1,00	1,04	0,55	0,84	0,87
4	Kab. Banjarnegara	0,94	0,89	1,08	0,23	0,68	0,76
5	Kab. Kebumen	0,93	1,06	1,02	0,93	0,80	0,95
6	Kab. Purworejo	0,95	1,08	1,01	0,27	1,45	0,95
7	Kab. Wonosobo	0,98	0,98	1,03	1,23	1,61	1,17
8	Kab. Magelang	1,00	0,95	1,04	0,79	0,97	0,95
9	Kab. Boyolali	1,06	0,90	1,03	2,22	1,17	1,27
10	Kab. Klaten	1,07	0,98	0,99	1,73	1,02	1,16
11	Kab. Sukoharjo	1,03	0,96	1,02	0,96	1,10	1,01
12	Kab. Wonogiri	1,23	0,97	0,99	0,48	1,01	0,94
13	Kab. Karanganyar	1,26	0,95	0,84	0,98	1,03	1,01
14	Kab. Sragen	1,22	0,87	1,02	0,10	0,85	0,81
15	Kab. Grobogan	0,96	0,94	1,04	9,39	0,90	2,65
16	Kab. Blora	1,11	0,95	1,00	0,38	1,42	0,97
17	Kab. Rembang	0,99	0,87	1,00	0,44	1,36	0,93
18	Kab. Pati	1,34	0,86	1,08	0,73	0,85	0,97
19	Kab. Kudus	0,97	0,88	1,05	1,05	1,51	1,09
20	Kab. Jepara	1,09	0,87	1,09	1,83	1,13	1,20
21	Kab. Demak	1,01	0,88	1,03	0,11	0,73	0,75
22	Kab. Semarang	1,20	1,07	1,01	1,20	1,11	1,12
23	Kab. Temanggung	1,21	1,15	0,90	0,47	2,06	1,16
24	Kab. Kendal	0,81	1,00	0,96	0,06	1,07	0,78
25	Kab. Batang	0,99	0,89	1,04	0,01	0,66	0,72
26	Kab. Pekalongan	0,88	0,87	1,05	0,58	1,10	0,90
27	Kab. Pemalang	0,82	0,90	1,03	0,57	0,80	0,82
28	Kab. Tegal	0,86	0,87	0,99	0,68	0,89	0,86
29	Kab. Brebes	0,79	0,79	1,01	0,03	1,00	0,72
30	Kota Magelang	1,03	1,85	0,91	0,11	1,80	1,14
31	Kota Surakarta	1,19	1,72	0,90	1,63	1,06	1,30
32	Kota Salatiga	1,10	1,61	0,83	0,55	1,10	1,04
33	Kota Semarang	1,12	1,57	0,83	0,39	2,09	1,20
34	Kota Pekalongan	0,99	1,12	1,01	0,09	1,39	0,92
35	Kota Tegal	0,89	1,23	1,03	1,47	1,30	1,18
	Rata-rata	1,03	1,05	1,00	1,00	1,17	1,05

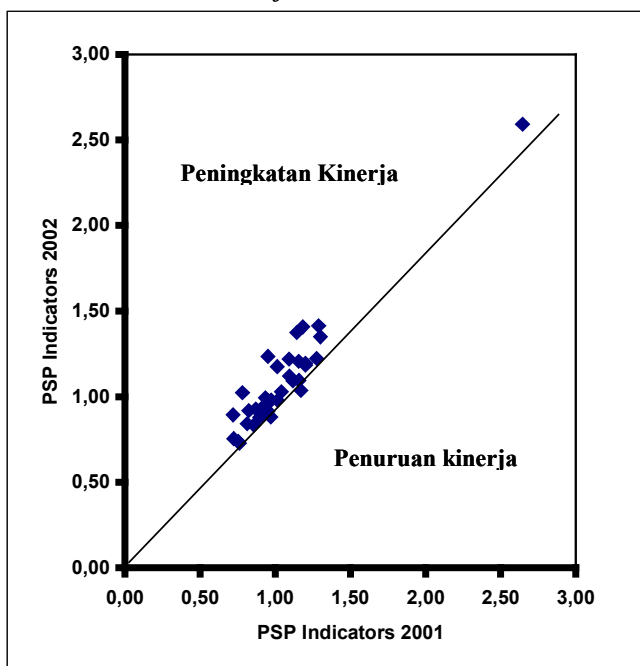
Sumber: data diolah

Tabel 2: Public Sector Performance (PSP) Tahun 2002

No	Kabupaten/Kota	Opportunity Indicators		Musgravian Indicators			Total PSP
		Kesehatan	Pendidikan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Kab. Cilacap	1,13	1,05	0,98	0,99	2,93	1,42
2	Kab. Banyumas	0,96	1,07	0,98	1,77	0,82	1,12
3	kab. Purbalingga	1,15	1,00	0,98	0,55	0,95	0,93
4	Kab. Banjarnegara	0,73	0,88	1,05	0,23	0,75	0,73
5	Kab. Kebumen	1,09	0,96	1,04	0,93	0,77	0,96
6	Kab. Purworejo	0,80	1,09	0,98	0,27	1,45	0,92
7	Kab. Wonosobo	0,87	0,90	1,01	1,23	1,17	1,04
8	Kab. Magelang	2,42	0,99	0,94	0,79	1,03	1,24
9	Kab. Boyolali	0,72	0,88	1,04	2,22	1,25	1,22
10	Kab. Klaten	0,81	0,99	0,99	1,73	0,94	1,10
11	Kab. Sukoharjo	1,06	0,87	0,96	0,96	1,04	0,98
12	Kab. Wonogiri	1,47	0,92	1,08	0,48	1,02	0,99
13	Kab. Karanganyar	1,86	0,98	0,99	0,98	1,07	1,18
14	Kab. Sragen	1,36	0,90	1,09	0,10	0,76	0,84
15	Kab. Grobogan	0,79	0,98	1,07	9,39	0,73	2,59
16	Kab. Blora	1,05	0,90	1,03	0,38	1,55	0,98
17	Kab. Rembang	0,68	0,95	1,06	0,44	1,51	0,93
18	Kab. Pati	0,82	0,94	1,21	0,73	0,71	0,88
19	Kab. Kudus	1,41	0,97	1,11	1,05	1,56	1,22
20	Kab. Jepara	1,19	0,84	1,07	1,83	1,05	1,20
21	Kab. Demak	1,00	0,88	0,97	0,11	0,75	0,74
22	Kab. Semarang	1,20	1,04	0,97	1,20	1,05	1,09
23	Kab. Temanggung	2,31	1,10	0,95	0,47	1,21	1,21
24	Kab. Kendal	2,10	1,03	0,90	0,06	1,03	1,02
25	Kab. Batang	1,94	0,87	0,94	0,01	0,71	0,89
26	Kab. Pekalongan	1,06	0,87	1,11	0,58	0,77	0,88
27	Kab. Pemalang	1,27	0,91	1,07	0,57	0,77	0,92
28	Kab. Tegal	0,79	0,88	1,00	0,68	0,83	0,83
29	Kab. Brebes	1,00	0,79	1,01	0,03	0,96	0,76
30	Kota Magelang	1,82	1,94	0,88	0,11	2,13	1,38
31	Kota Surakarta	1,28	1,81	0,83	1,63	1,21	1,35
32	Kota Salatiga	0,81	1,47	0,74	0,55	1,57	1,03
33	Kota Semarang	1,16	1,55	0,89	0,39	1,93	1,18
34	Kota Pekalongan	1,03	1,19	1,04	0,09	1,36	0,94
35	Kota Tegal	1,77	1,25	1,03	1,47	1,52	1,41
	Rata-Rata	1,23	1,05	1,00	1,00	1,17	1,09

Sumber: data diolah

Gambar 3.
Public Sector Performance: 2001 dan 2002



Sumber: Data diolah

Gambar 3 menunjukkan plot kinerja PSP tahun 2001 dengan tahun 2002 seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Melalui gambar tersebut bisa dilihat apakah tahun 2002 terjadi peningkatan atau penurunan kinerja PSP dengan melihat apakah plot berada di atas atau di bawah garis diagonal. Garis diagonal dalam gambar tersebut membagi ke dalam dua kuadran. Kuadran kiri atas adalah kuadran untuk peningkatan kinerja PSP, sedangkan kuadran kanan atas adalah kuadran untuk penurunan kinerja PSP.

Beberapa kabupaten/kota menunjukkan peningkatan kinerja sektor publik yang ditunjukkan dengan titik dalam Gambar 3 yang semakin ke kiri atas. kabupaten/kota tersebut antara lain Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonogiri,

Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Beberapa kabupaten/kota lainnya menunjukkan penurunan kinerja sektor publik yang ditunjukkan dengan titik dalam Gambar 3 yang semakin ke bawah kanan. Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Kabupaten/kota yang tidak mengalami perubahan kinerja sektor publik adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Jepara. Perlu digarisbawahi bahwa perubahan (peningkatan maupun penurunan) kinerja sektor publik kabupaten/kota dalam hal ini dihitung relatif terhadap kabupaten/kota lainnya bukan dihitung dari kinerja sektor publik kabupaten/kota tertentu pada suatu tahun tertentu relatif terhadap tahun sebelumnya.

Public Sector Efficiency

Data diolah dengan metode sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya untuk mendapatkan nilai *Public Sector Efficiency* tiap-tiap daerah. PSE tahun 2001 dan tahun 2002 dapat dilihat dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

Indikator total PSE pada tahun 2001 bervariasi signifikan. Kabupaten/kota dengan indikator total PSE paling tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan sub-sub indikator, pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan indikator PSE kesehatan paling tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Magelang. Kabupaten/kota dengan indikator PSE pendidikan paling tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Cilacap Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten/kota dengan indikator PSE distribusi paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan dan Kota Surakarta. Kabupaten/kota dengan indikator PSE sta-

bilitas paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta dan Kabupaten Pekalongan. Kabupaten/kota dengan indikator PSE kinerja ekonomi paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE total PSE paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE kesehatan paling tinggi berturut-turut adalah Kota Surakarta, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Temanggung. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE pendidikan paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Temanggung, Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE distribusi paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE stabilitas paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan indikator PSE kinerja ekonomi paling tinggi berturut-turut adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kota Surakarta, Kota Pekalongan dan Kota Magelang.

Tabel 3: Public Sector Efficiency Indicators 2001

No	Kabupaten/Kota	Opportunity Indicators		Musgravian Indicators			Total PSE
		Kesehatan	Pendidikan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Kab. Cilacap	4.17	7.88	5.57	5.16	12.93	7.14
2	Kab. Banyumas	1.09	0.77	0.91	0.88	0.53	0.83
3	kab. Purbalingga	0.27	0.48	0.71	0.67	0.58	0.54
4	Kab. Banjarnegara	1.05	1.43	1.20	1.09	0.75	1.11
5	Kab. Kebumen	2.58	1.29	0.87	0.84	0.68	1.25
6	Kab. Purworejo	-	-	-	-	-	-
7	Kab. Wonosobo	1.56	1.44	0.83	0.79	1.29	1.18
8	Kab. Magelang	3.87	2.54	1.12	1.05	1.03	1.92
9	Kab. Boyolali	1.23	2.50	1.09	1.04	1.24	1.42
10	Kab. Klaten	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Sukoharjo	1.46	1.37	1.34	1.30	1.46	1.39
12	Kab. Wonogiri	2.07	0.89	0.82	0.81	0.83	1.08
13	Kab. Karanganyar	3.78	8.56	0.94	1.09	1.14	3.10
14	Kab. Sragen	-	-	-	-	-	-
15	Kab. Grobogan	7.55	4.05	0.66	0.63	0.57	2.69
16	Kab. Blora	0.75	0.43	0.61	0.60	0.87	0.65
17	Kab. Rembang	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Pati	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Kudus	4.41	3.87	4.36	4.10	6.28	4.60
20	Kab. Jepara	0.52	0.37	1.28	1.15	1.32	0.93
21	Kab. Demak	-	5.33	1.17	1.12	0.83	2.11
22	Kab. Semarang	1.01	1.07	1.30	1.26	1.42	1.21
23	Kab. Temanggung	1.34	1.35	0.73	0.80	1.66	1.17
24	Kab. Kendal	0.34	0.56	1.46	1.49	1.63	1.10
25	Kab. Batang	0.64	0.49	1.01	0.96	0.65	0.75
26	Kab. Pekalongan	3.33	0.52	1.45	1.36	1.52	1.63
27	Kab. Pemasang	-	-	-	-	-	-
28	Kab. Tegal	0.29	0.50	0.81	0.81	0.73	0.63
29	Kab. Brebes	0.80	0.48	1.07	1.04	1.06	0.89
30	Kota Magelang	1.19	2.72	0.68	0.73	1.34	1.33
31	Kota Surakarta	19.49	17.09	1.35	1.47	1.59	8.20
32	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-
33	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-
34	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-	-
35	Kota Tegal	1.27	1.20	0.76	0.73	0.95	0.98
	Rata-Rata	2.64	2.66	1.31	1.27	1.73	1.92

Sumber: data diolah

Tabel 4: Public Sector Efficiency Indicators 2002

No	Kabupaten/Kota	Opportunity Indicators		Musgravian Indicators			Total PSE
		Kesehatan	Pendidikan	Distribusi	Stabilitas	Kinerja Ekonomi	
1	Kab. Cilacap	12.27	15.77	7.27	7.27	21.62	12.84
2	Kab. Banyumas	4.25	1.51	0.95	1.72	0.80	1.84
3	kab. Purbalingga	0.52	0.76	0.82	0.45	0.79	0.67
4	Kab. Banjarnegara	1.29	1.18	1.12	0.25	0.80	0.93
5	Kab. Kebumen						
6	Kab. Purworejo	2.53	2.41	0.88	0.24	1.30	1.47
7	Kab. Wonosobo	0.35	1.03	0.75	0.91	0.87	0.78
8	Kab. Magelang						
9	Kab. Boyolali	2.20	6.34	1.30	2.77	1.56	2.83
10	Kab. Klaten	2.38	2.94	1.10	1.92	1.05	1.88
11	Kab. Sukoharjo	1.18	1.94	1.33	1.33	1.45	1.45
12	Kab. Wonogiri	3.24	1.48	0.98	0.43	0.93	1.41
13	Kab. Karanganyar						
14	Kab. Sragen	3.15	2.37	0.87	0.08	0.60	1.42
15	Kab. Grobogan	0.49	0.51	0.80	7.05	0.55	1.88
16	Kab. Blora						
17	Kab. Rembang	0.38	0.81	0.99	0.42	1.42	0.80
18	Kab. Pati						
19	Kab. Kudus						
20	Kab. Jepara	0.81	0.65	1.53	2.60	1.49	1.42
21	Kab. Demak	13.61		0.75	0.08	0.59	3.76
22	Kab. Semarang						
23	Kab. Temanggung	8.23	6.22	0.99	0.48	1.26	3.44
24	Kab. Kendal	12.85	2.54	1.97	0.13	2.26	3.95
25	Kab. Batang	2.72	0.75	0.96	0.01	0.72	1.03
26	Kab. Pekalongan	5.12	0.84	1.50	0.79	1.05	1.86
27	Kab. Pemasang	3.42	0.80	1.32	0.70	0.94	1.44
28	Kab. Tegal	0.39	0.66	0.85	0.58	0.71	0.64
29	Kab. Brebes	2.70	0.55	1.32	0.04	1.25	1.17
30	Kota Magelang	1.38	2.40	0.69	0.08	1.66	1.24
31	Kota Surakarta	14.55	5.24	1.32	2.60	1.93	5.13
32	Kota Salatiga	0.36	1.60	0.50	0.37	1.07	0.78
33	Kota Semarang						
34	Kota Pekalongan	1.86	0.81	1.45	0.13	1.90	1.23
35	Kota Tegal	0.33	0.23	0.49	0.70	0.72	0.50
	Rata-Rata	3.80	2.40	1.29	1.27	1.90	2.14

Sumber: Berbagai sumber, data diolah

PENGELUARAN PEMERINTAH

Pengeluaran publik pemerintah yang dinyatakan dalam persentase terhadap GDP merefleksikan opportunity cost yang dikeluarkan untuk mencapai skor PSP.

Tabel 5 menerangkan bahwa Pengeluaran pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah masih sangat kecil. Rata-rata pengeluaran pemerintah dalam bidang kesehatan hanya sekitar 0.19 persen dari PDRB. Rata-rata pengeluaran pemerintah dalam bidang pendidikan hanya sekitar 0.15 persen dari PDRB. Sementara, rata-rata total pengeluaran adalah 9.14 persen dari PDRB.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Musgrave dan Wagner yaitu, pengeluaran pemerintah untuk negara-negara yang belum maju akan cenderung rendah dan seiring dengan majunya negara tersebut persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDRB akan terus meningkat.

Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk indikator pendidikan yang tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kendal Kabupaten Batang dan Kabupaten Tegal. Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran

pemerintah untuk indikator kesehatan yang tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Batang. Pada tahun 2001 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk indikator total pengeluaran yang tertinggi berturut-turut Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Purbalingga, Kota Tegal dan Kota Magelang.

Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk indikator pendidikan yang tertinggi berturut-turut adalah Kota Tegal, Kabupaten Grobogan, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk indikator kesehatan yang tertinggi berturut-turut adalah Kota Tegal, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Tegal. Pada tahun 2002 kabupaten/kota dengan tingkat pengeluaran pemerintah untuk indikator total pengeluaran yang tertinggi berturut-turut adalah Kota Tegal, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Tabel 5: Pengeluaran Pemerintah Tahun 2001 dan 2002 (persen)

No	Kabupaten/Kota	2001			2002		
		Pend	Kes	Tot Exp	Pend	Kes	Tot. Exp
1	Kab. Cilacap	0.02	0.03	1.80	0.02	0.02	1.45
2	Kab. Banyumas	0.27	0.13	10.56	0.16	0.04	11.05
3	kab. Purbalingga	0.39	0.51	13.77	0.31	0.39	12.89
4	Kab. Banjarnegara	0.12	0.13	8.48	0.17	0.10	10.04
5	Kab. Kebumen	0.15	0.05	11.02	-	-	-
6	Kab. Purworejo	-	-	-	0.11	0.06	11.89
7	Kab. Wonosobo	0.13	0.09	11.78	0.20	0.44	14.45
8	Kab. Magelang	0.07	0.04	8.81	-	-	-
9	Kab. Boyolali	0.07	0.13	8.89	0.03	0.06	8.57
10	Kab. Klaten	-	-	-	0.08	0.06	9.64
11	Kab. Sukoharjo	0.13	0.10	7.14	0.10	0.16	7.73
12	Kab. Wonogiri	0.20	0.09	11.46	0.14	0.08	11.73
13	Kab. Karanganyar	0.02	0.05	8.49	-	-	-
14	Kab. Sragen	-	-	-	0.09	0.08	13.37
15	Kab. Grobogan	0.04	0.02	14.81	0.45	0.28	14.24
16	Kab. Blora	0.42	0.22	15.40	-	-	-
17	Kab. Rembang	-	-	-	0.27	0.31	11.44
18	Kab. Pati	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Kudus	0.04	0.03	2.26	-	-	-
20	Kab. Jepara	0.45	0.31	8.03	0.30	0.26	7.52
21	Kab. Demak	0.03	-	8.30	-	0.01	13.70
22	Kab. Semarang	0.19	0.18	7.34	-	-	-
23	Kab. Temanggung	0.16	0.13	11.64	0.04	0.05	10.31
24	Kab. Kendal	0.34	0.35	6.22	0.09	0.03	4.87
25	Kab. Batang	0.34	0.23	9.68	0.27	0.13	10.47
26	Kab. Pekalongan	0.31	0.04	6.84	0.24	0.04	7.92
27	Kab. Pemalang	-	-	-	0.26	0.07	8.73
28	Kab. Tegal	0.33	0.43	11.41	0.31	0.36	12.53
29	Kab. Brebes	0.31	0.15	8.93	0.33	0.07	8.19
30	Kota Magelang	0.13	0.13	12.64	0.19	0.23	13.70
31	Kota Surakarta	0.02	0.01	6.30	0.08	0.02	6.69
32	Kota Salatiga	-	-	-	0.21	0.40	15.72
33	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-
34	Kota Pekalongan	-	-	-	0.34	0.10	7.65
35	Kota Tegal	0.19	0.10	12.79	1.24	0.95	22.45
	Rata-Rata	0.19	0.15	9.41	0.23	0.18	10.70

Sumber: Berbagai sumber, data diolah

Keterangan : Pengeluaran pemerintah dinyatakan sebagai persen dari PDRB

Pend : Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan

Kes : Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan

Tot. Exp. : Total Pengeluaran Pemerintah. (-) tidak tersedia data.

Free Disposable Hull

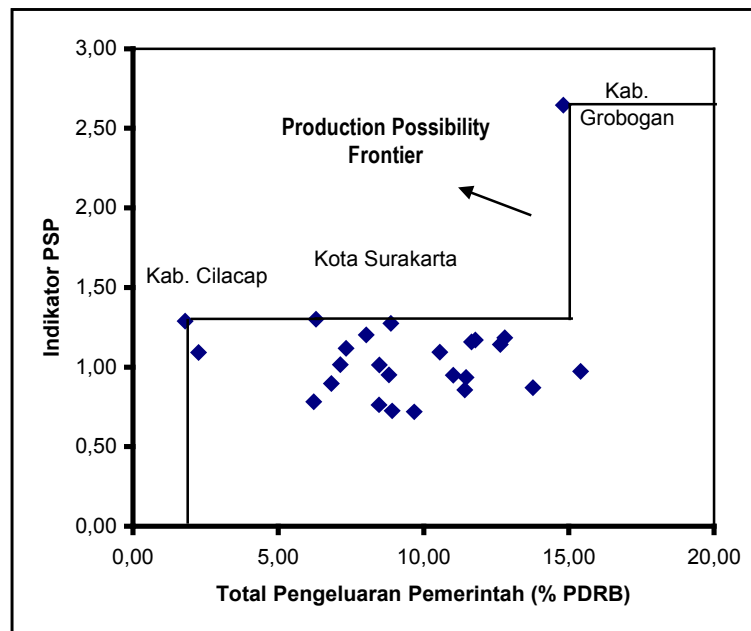
Teknik *Free Disposable Hull* yang telah dijelaskan dalam Bab III digunakan untuk menganalisis efisiensi pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, PSP indikator digunakan sebagai output dan total pengeluaran pemerintah digunakan sebagai input.

Gambar 4 menunjukkan kabupaten/kota yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lain pada tahun 2001. Kabupaten/kota yang relatif efisien terletak pada *Production Possibility Frontier*. Pada tahun 2001, kabupaten/kota yang relatif efisien adalah Kabupaten Cilacap, Kota Surakarta dan Kabupaten Grobogan.

Kabupaten/kota yang terletak di daerah segi empat di sebelah kanan di bawah *Production Possibility Frontier* relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang terletak di *Production Possibility Frontier*.

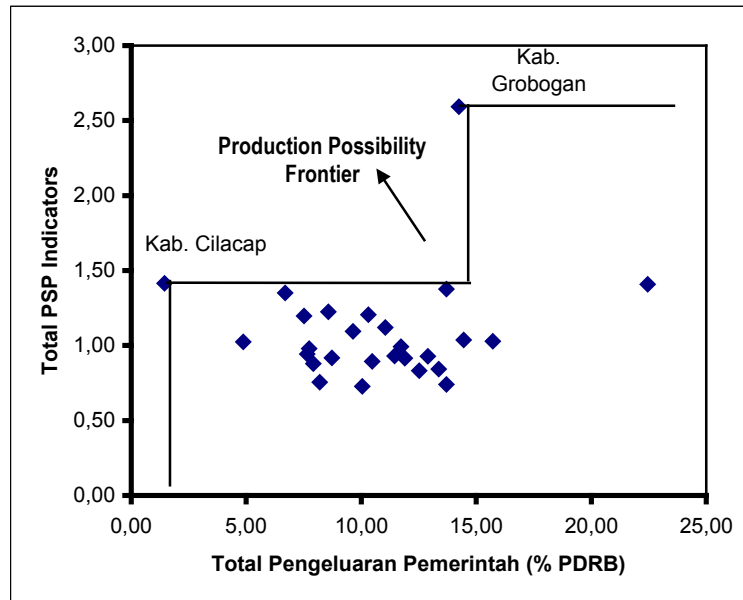
Dalam kasus ini, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Kendal relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap. Sementara, Kabupaten Blora relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan. Sementara kabupaten/kota lainnya relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan Kota Surakarta.

Gambar 4:
Production Possibility Frontier Tahun 2001



Sumber: data diolah

Gambar 5
Production Possibility Frontier Tahun 2002



Sumber: data diolah

Gambar 5 menunjukkan kabupaten/kota yang relatif lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2002. Kabupaten/kota yang relatif efisien terletak pada *Production Possibility Frontier*, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan. Kabupaten/kota lainnya yang tidak terletak di *Production Possibility Frontier* yang berelasi dengannya dianggap relatif tidak efisien. Dengan demikian, Kabupaten Wonosobo, Kota Salatiga dan Kota Tegal relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan. Sementara, kabupaten/kota lainnya relatif tidak efisien jika dibandingkan dengan Kabupaten Cilacap.

Efficiency Score

Dari metode *Free Disposable Hull* dapat diketahui kabupaten/kota mana saja yang relatif efisien dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Untuk melengkapinya

perhitungan *Free Disposable Hull* perlu dilakukan perhitungan *efficiency score* sehingga bisa diketahui peringkat efisiensi masing-masing kabupaten/kota baik dari sisi input maupun sisi output.

Kabupaten/kota yang terletak pada *Production Possibility Frontier* berada di peringkat 1 karena merupakan kabupaten/kota yang relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2001 kabupaten/kota yang berada di peringkat satu adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Grobogan dan Kota Surakarta. Sementara pada tahun 2002, kabupaten/kota yang berada pada peringkat 1 adalah kabupaten Cilacap dan Kabupaten Grobogan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja pemerintah untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah, *PSP Indicators*, terlihat bahwa ternyata kabupaten/kota yang

proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak serta merta memiliki angka indikator yang tinggi. Demikian pula dalam penghitungan efisiensi dengan *Public Sector Efficiency* maupun *Free Disposable Hull*, kabupaten/kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak selalu relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah

tidak berkorelasi dengan efisiensi dalam penggunaannya.

Model pengukuran efisiensi dan kinerja sektor publik yang dikembangkan ini masih sangat terbuka untuk mempertimbangkan lebih banyak indikator-indikator sosial selain kesehatan dan pendidikan untuk lebih bisa mencakup kriteria-kriteria sasaran pembangunan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Afonso Antonio, *et al.* (2003), *Public Sector Efficiency: An International Comparison*, European Central Bank Working Papers No. 242.
- Bahl, Roy, (2000), *How to Design a Fiscal Decentralization* dalam Yusuf Sahid, et, al (ed) *Local Dynamics in an Era of Globalization*, The World Bank, Exford University Press.
- Bird Richard & Francois Vaillancourt, (ed) (1998), *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press.
- Chu Ke-Young & Richard Hemming (ed). (1991). *Public Expenditure Handbook, A Guide to Public Policy Issues in Developing Countries*, International Monetary Fund, Washington D.C.
- Gupta Sanjeev, *et al.* (1997), *The Efficiency of Government Expenditure: Experiences from Africa*, IMF Working Paper
- Loeher, William & Rosario Manassan (2004), *Fiscal Decentralization and Economic Efficiency: Measurement and Evaluation, Consulting Assistance on Economic Reform II*, [file:///G:/Discussion%20on%20efficiency\Fiscal%20Decentralization%20%20Economic%](file:///G:/Discussion%20on%20efficiency\Fiscal%20Decentralization%20%20Economic%20)
- Martinez-Vazquez, *et al.* (2001), *Fiscal Decentralization and Economic Growth*,
- Peterson E, George, (2002), *Pakistan's Fiscal Decentralization: Issues and Opportunities*, World Bank.
- Smoke Paul, (2000), *Strategies Fiscal Decentralization in Developing Countries: Learning from Recent Innovations*, dalam Yusuf Sahid, et al (ed), *Local Dynamics in an Era of Globalization*, The World Bank, Exford University Press.
- UNDP, (1999), *Decentralization: A Sampling of Definitions*, UNDP Working Paper
- Wescott, Clair & Doug Porter, (2002), *Fiscal Decentralization and Citizen Participation in East Asia*, INDES, Workshop, Asian Development Bank.
- Yusuf Sahid, et al.(ed). (2000). *Local Dynamics in an Era of Globalization*, The World Bank, Exford University Press.